

# Pura Besakih: Di antara Legenda dan Sejarah Penguasa Bali

IDG Windhu Sancaya\*



Judul buku : Pura Besakih; Pura,  
Agama, dan Masyarakat Bali  
Penulis : David J. Stuart Fox  
Penerjemah: Ida Bagus Putra Yadnya  
Tebal : xx + 550 (termasuk index)  
Penerbit : Pustaka Larasan, KITLV  
Jakarta, dan Udayana  
University Press  
Tahun : 2010

David J. Stuart Fox, penulis buku *Pura Besakih; Pura, Agama, dan Masyarakat Bali*, mungkin merupakan satu dari sedikit orang yang mendapat kesempatan langsung menyaksikan dari dekat hampir seluruh rangkaian upacara *Eka Dasa Rudra* yang digelar di Pura Besakih tahun 1979 silam. Sebuah pengalaman yang sangat langka. “*Ekadasa Rudra* adalah upacara terbesar yang dikenal dalam Hindu Bali. Upacara ini hanya dilakukan di Besakih. Secara visual upacara tersebut sangat memesona”, komentarnya.

Buku ini memang tidak secara spesifik membicarakan rangkaian pelaksanaan upacara *Eka Dasa Rudra* tahun 1979 itu karena sudah diterbitkan tersendiri. Buku ini merupakan satu penelitian antropologi, sejarah, dan sosiologi ‘paling komprehensif’ tentang Pura Besakih hingga abad XX (1987) yang diketahui sampai saat ini.

---

\* Dosen Jurusan Sastra Daerah, Fakultas Sastra Unud, kini sedang menempuh program S-3 Wacana Sastra, di Program Pascasarjana Unud.

### ***Huluning Jagat Bali***

Bagi masyarakat Bali Pura Besakih adalah *huluning jagat* Bali atau 'Kepalanya Pulau Bali'. Kepala merupakan bagian yang paling atas dari struktur tubuh seorang manusia normal. Kepala memiliki kedudukan yang sangat penting, yang oleh orang Bali disebut sebagai tempat *Siwadwara*, yaitu sebagai pintu masuk dan keluarnya roh yang Maha Agung (Siwa) secara mistis melalui ubun-ubun. Oleh sebab itu, kepala memiliki kedudukan yang sangat penting bagi orang Bali yang beragama Hindu. Sebagai lawan daripada *hulu* (kepala, gunung) adalah *tebèn* (kaki, laut). Istilah *hulu- tebèn* sangat dikenal dalam konteks tataruang Bali. *Hulu* adalah tempat yang (dianggap) suci dan *tebèn* adalah tempat yang (dianggap) tidak suci (*leteh*). Selebihnya setiap ruang dianggap memiliki sisi *hulu* maupun *tebèn*.

*Hulu* merupakan tempat bersemayamnya para Dewa dan roh-roh yang telah suci, *tebèn* merupakan tempat bersemayamnya kekuatan jahat dan roh-roh yang belum disucikan seperti kuburan dan sebagainya. Namun demikian *hulu* dan *tebèn* merupakan dua kutub yang tidak bisa dipisahkan dalam konsep *rwa bhineda* (dua yang berbeda). Sebagai *huluning jagat* Bali, Pura Besakih 'dengan sendirinya' dianggap sebagai tempat yang sangat suci dan juga sangat dikeramatkan. Namun, apakah yang telah terjadi dengan Pura Besakih sebagai *huluning jagat* Bali saat ini? Sejauh manakah buku tentang Pura Besakih ini menggambarkan keberadaan Pura Besakih sebagai *huluning jagat* Bali?

### **Legenda Pura dan Sejarah Para Penguasa**

Buku yang terdiri dari dua belas bab ini hampir memberikan gambaran yang menyeluruh tentang perkembangan sejarah Pura Besakih yang dikaitkan dengan sejarah politik (di) Bali. Kerangka kerja hubungan sejarah pura dengan sejarah politik ini memberikan kemungkinan bagi David untuk menelusuri lebih dalam persoalan-persoalan yang terkait dengan Pura Besakih. Hal itu sangat masuk akal karena kedudukan Pura Besakih sebagai salah satu tempat suci paling penting di Bali memang sangat

terkait dengan sikap dan perilaku para penguasa di Bali untuk menempatkan Pura Besakih dalam konstelasi ideologi politik mereka, sejak abad XII.

David memerlukan dua bab untuk membahas hubungan antara Pura (Besakih) dengan Negara, yaitu Bab X dan Bab XI yang masing-masing membicarakan hubungan Pura (Besakih) dengan Negara pada periode pemerintahan istana-istana tradisional dari zaman kerajaan Bali Kuna sampai dengan kerajaan Bali Abad XIX; dan perkembangan hubungan Pura Besakih dengan Negara hingga Abad XX, yaitu dari zaman kolonial Belanda sampai zaman kemerdekaan.

Secara historis, berbagai legenda telah menjelaskan keberadaan Pura Besakih, baik melalui sumber-sumber tertulis seperti Usana Bali maupun kisah-kisah lisan dalam cerita rakyat. Menurut sumber-sumber tersebut, Sri Kesari Warmadewa, pendiri dinasti Warmadewa yang menguasai Bali selama beberapa abad, dipercaya sebagai pendiri pertama kompleks pura di Besakih. Namun, David meragukan kebenaran legenda-legenda tersebut karena aspek cerita tentang Sri Wira Dalem Kesari (Sri Kesari Warmadewa) tersebut menunjukkan hubungan dengan dinasti Jaya yang memerintah Bali pada abad ke-12, antara tahun 1131-1200 (hlm. 309-14). Dinasti Jaya yang dimaksudkan David adalah Jayasakti, Ragajaya, Jayapangus, dan Ekajaya-Lancana. Berdasarkan data prasasti Sading C (Bantiran), David memperkirakan bahwa Sri Wira Dalem Kesari adalah nama lain dari Jayasakti yang memerintah Bali antara tahun 1131-1150.

Keberadaan tokoh sejarah Mpu Kuturan dan Mpu Bharadah juga dikaitkan dengan dengan cerita tentang Besakih. Mpu Kuturan secara tradisional dihubungkan dengan Pura Peninjoan dan sebagai arsitek pembangunan Pura Besakih. Tempat ini konon dipakai oleh Mpu Kuturan sebagai titik pangkal tertinggi untuk merancang pembangunan kawasan Pura Besakih. Mengenai hal ini pun David masih meragukannya (hlm. 311). Nama Rsi Markandeya yang dikisahkan berasal dari Gunung Raung Jawa Timur dikaitkan dengan pendirian Pura Basukian. Legenda ini

menurut David merupakan sesuatu yang baru yang sumbernya tidak ditemukan, baik di dalam teks seperti Usana Bali maupun sumber lainnya. Legenda tentang Rsi Markandeya ditemukan berdasarkan koleksi E. Korn tahun 1932 yang ditulis bersumber dari cerita seorang pedanda di Lebah Gianyar. Sumber-sumber lain yang menyangkut legenda Rsi Markandeya ini pun oleh David dianggap sebagai sesuatu yang baru muncul sekitar tahun 1930-an (hlm. 307).

Semua keraguan yang disampaikan David yang selama ini diyakini sebagai sesuatu yang 'benar' oleh masyarakat Bali mestinya menantang para sejarawan atau arkeolog untuk memperoleh jawaban yang benar. Kecuali menunjukkan keraguannya, David tidak (dapat) menjelaskan tentang kemungkinan perlakuan para penguasa zaman Bali Kuna terhadap Pura Besakih. Bahkan, ia ingin mengingatkan bahwa Pura Penulisan di Kintamani memiliki peranan yang sangat penting. "Walaupun lebih baik daripada yang lain sebagai tempat suci yang utama di Gunung Agung, Pura Besakih pada saat sekarang ini tidak perlu menjadi pura gunung yang paling penting", demikian David (hlm. 317).

Setelah Bali ditaklukkan oleh Majapahit, perhatian terhadap Pura Besakih mulai diberikan oleh Dalem Ketut Ngulesir, penguasa kerajaan Gelgel pertama (1380-1480), karena keyakinan pada gunung sebagai tempat bersemayamnya para Dewa. Gunung dalam kepercayaan Hindu (Jawa) disebut sebagai *lingga acala* (*lingga* alam semesta). Pada saat inilah tanggung jawab terhadap penataan dan penyelenggaraan upacara di Pura Besakih jelas-jelas menjadi tanggung jawab penguasa (raja). Dua buah Purana (sejenis prasasti yang dikenal dengan nama Raja Purana Besakih) yang kini disimpan di Pura Besakih diyakini berasal dari raja Gelgel ini. Kedua prasasti tersebut menyatakan bahwa desa *hulundang* di Basuki (Besakih) merupakan sebuah desa yang 'dilarang' atau 'terlarang' untuk dilewati siapa saja (hlm. 322). Raja Purana Besakih ini secara jelas menjaga wilayah *kekeran* (radius yang disucikan) Pura Besakih, yang sayang saat ini telah banyak dilanggar, sehingga kesuciannya sebagai *huluning jagat*

*Bali* sangat terancam. Raja Purana menunjukkan bahwa ada tiga bagian divisi yang bertanggung jawab terhadap pura dan ritual di Besakih, yaitu Ida Dalem bersama-sama Anglurah Sidemen atas Pura Penataran Agung, Arya Karangasem dan Ksatria Tamanbali untuk Pura Kiduling Kreteg dan Pura Batumadeg, serta para pejabat lokal.

Pada abad XIX suatu konfigurasi baru kekuatan politik muncul di Bali. Para penguasa Klungkung telah kehilangan hegemoni politik yang dulu hanya dimiliki oleh pemerintahan Gelgel. Pura Besakih kemudian berada di bawah hegemoni kekuasaan Karangasem. Hal itu ikut mempengaruhi kedudukan Pura Besakih dalam konstelasi politik Bali. Pada zaman kolonial, Belanda tidak ikut campur untuk mengurus Pura Besakih. Namun, kekacauan politik pada zaman kolonial (awal abad XX) berdampak pada diabaikannya Pura Besakih. Segera setelah gempa bumi melanda Bali tahun 1917, tiga penguasa lokal yaitu *stedehouder* Karangasem, Bupati Gianyar, dan Bupati Bangli mendeklarasikan bahwa “Kita telah mengabaikan Pura Besakih, tempat kita memuja Tuhan, selama 16 tahun, dan tidak pernah menyelenggarakan upacara di sana” (hlm. 354).

Memasuki abad XX perubahan konstelasi politik dari Negara kerajaan ke Negara Republik juga ikut mengubah struktur dan penataan atas Pura Besakih. Tahun 1963 mulai dilakukan penataan dan penyelenggaraan upacara besar Eka Dasa Rudra oleh Gubernur Bali I Gusti Bagus Sutedja. Penataan yang sungguh-sungguh mulai dilakukan lagi pada saat Ida Bagus Mantra menjadi Dirjen Kebudayaan dan Gubernur Bali (1978-1988), hingga pemerintahan Gubernur Bali Dewa Made Beratha (1998-2008).

Secara sistematis buku ini menyajikan uraian tentang letak geografis Pura Besakih di wilayah Karangasem Barat (Bab I), sistem desa adat di Bali yang memiliki kaitan erat dengan keberadaan Pura (Bab II), uraian mengenai hirarki pura di Bali (Bab III), berbagai kompleks pura yang ada di Besakih (Bab IV dan V), hingga hirarki sistem upacara agama (Bab VI), idiom-idiom ritual (Bab VII), tujuan pelaksanaan ritual (Bab VIII dan IX), dan

tentu saja pelaksanaan upacara Panca Walikrama dan Eka Dasa Rudra yang dipandang sebagai puncak hirarki ritual di Pura Besakih (Bab XII).

Penelitian Pura Besakih sudah pernah dilakukan beberapa peneliti terutama dari segi arkeologi dan sejarah, seperti dilakukan oleh Roelof Goris (1937, 1953, 1969), IB Rata (1992), dan lain-lain. Meskipun edisi terjemahan dalam bahasa Indonesia (2010) tidak menyertakan studi tentang perkembangan terakhir Pura Besakih, namun sebagai suatu studi yang komprehensif dan mendalam buku ini sangatlah menarik untuk disimak.

Dalam kurun waktu lima belas tahun dari sejak disertasi tentang Pura Besakih ini selesai ditulis (1987) sampai dengan diterbitkannya menjadi buku dalam edisi bahasa Inggris (2002), telah banyak perubahan, baik fisik maupun non-fisik, yang terjadi di Besakih. David menyadari bahwa memasuki abad XXI (Pasca-Orde Baru dan Reformasi) banyak hal dan perubahan sesungguhnya telah terjadi terkait dengan Pura Besakih. Karena cukup kompleksnya perkembangan yang telah dan tengah melanda Pura Besakih dalam kurun waktu tersebut, ia lebih memilih membiarkan edisi terjemahan ini terbit tanpa perubahan yang berarti. Ia hanya menambahkan sedikit penjelasan pada bagian Kata Penutup (hlm. 509) tentang sejumlah perkembangan yang terjadi di sekitar persoalan Pura Besakih, dan daftar publikasi (bibliografi) yang dianggap relevan dengan Pura Besakih pasca penelitian yang dilakukannya.

Buku yang diterbitkan berdasarkan disertasinya (1987) ini pertama kali dicetak dalam edisi bahasa Inggris tahun 2002. Edisi bahasa Inggris tidak banyak dibaca oleh pembaca Bali karena faktor bahasa. Kini dengan diterbitkannya dalam edisi bahasa Indonesia, diharapkan agar buku penting ini segera dibaca oleh sebagian besar orang Bali, para pemuka adat, agama, masyarakat, para pengambil kebijakan serta para peneliti sejarah dan kebudayaan, untuk merenungkan kembali apa yang telah terjadi pada Pura Besakih di masa lalu dan bagaimana kondisinya di masa kini.